



**PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KINERJA

PENGADILAN AGAMA BONTANG



bangga
melayani
bangsa



TAHUN 2025-2026

 pa-bontang.go.id

 kantor.pabontang@gmail.com

 (0548) 23001

 0813-5125-6098

  [pengadilanagamabontang](https://www.instagram.com/pengadilanagamabontang)

  [Pengadilan Agama Bontang](https://www.facebook.com/Pengadilan%20Agama%20Bontang)

 [Jl. Awang Long No. 69](https://www.google.com/maps/place/Jl.+Awang+Long+No.+69,+Kota+Bontang)

[Kota Bontang](https://www.google.com/maps/place/Jl.+Awang+Long+No.+69,+Kota+Bontang)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2026

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan:

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia. Untuk melaksanakan itu Pengadilan Agama Bontang telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu lembaga/kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari kementerian/lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahunan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2025.

Berikut disampaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang beserta RKT 2025 dan Reviu RKT 2024 sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu b. Persentase pengiriman/penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding/kasasi/PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi g. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama 	<ul style="list-style-type: none"> 98% 100% 100% 100% 70% 85% 100% 100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layan yang ditetapkan b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama 	<ul style="list-style-type: none"> 3,7 100%

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95
		c. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	100
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	78
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	78
		f. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,0

Bontang, 3 November 2025

Ketua Pengadilan Agama Bontang



Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP. 197804052009121001

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		b. Persentase pengiriman/penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding/kasasi/PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%
		g. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court	100%
		h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%
		2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95

		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78
		d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,0



Bontang, 24 Februari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nor-Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP. 197804052009121001

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024 PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
KINERJA UTAMA			
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	97%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%
		d. Indek persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	85%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
KINERJA LAINNYA			
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	a. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Meningkatnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95%
		c. Meningkatnya Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,0
		d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90%
6	Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan	Terlaksananya Penguatan pengawasan secara rutin terhadap kinerja pengadilan	100%
7	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Terlaksananya program kerja dan pemenuhan <i>evidence</i> pembangunan zona integritas	90%

Bontang, 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Bontang



 No. Hasanuddin, Lc., M.A.
 NIP. 197804052009121001

**REVIU SHEET
RENCANA KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang

**PENJELASAN ATAS PERUBAHAN RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 pada tanggal 16 September 2025, Pengadilan Agama Bontang sebagai pengadilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung RI perlu menindaklanjuti arah kebijakan strategis tersebut. Sebagai bentuk implementasi Renstra MA RI 2025-2029, Pengadilan Agama Bontang melakukan penyesuaian kembali terhadap sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan agar indikator kinerja, target capaian, serta program/kegiatan yang direncanakan selaras dengan tujuan, sasaran dan prioritas strategis Mahkamah Agung RI pada periode 2025-2029.

Dengan adanya penyesuaian sasaran strategis tersebut, diharapkan Rencana Kinerja Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang tetap relevan, terukur, dan mampu mendukung pencapaian kinerja Lembaga secara optimal sesuai kerangka Renstra yang baru

Sebelum	Sesudah
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi Sasaran Strategis 6 : Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan Sasaran Strategis 7 : Optimalnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional